

PEDOMAN WAWANCARA

(Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)
Provinsi DKI Jakarta)

1. Proses pengawasan Pajak Restoran sebelum diadakannya sistem *online*.
2. Kemudahan bagi fiskus dan Wajib Pajak dengan diterapkannya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.
3. Mekanisme Dipenda dalam proses pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.
4. Pelaksanaan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.
5. Pencegahan penyimpangan peraturan perundang-undangan melalui pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online*.
6. Penghindaran pembayaran Pajak Restoran dengan adanya administrasi Wajib Pajak Restoran melalui sistem *online*.
7. Pengaruh pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* terhadap jumlah tunggakan pajak.
8. Peran Dipenda selaku pengawas proses administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* dalam peningkatan penerimaan pajak.
9. Mempertegas pemberian sanksi atau hukuman melalui pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.

PEDOMAN WAWANCARA

(Subdinas Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah
(Dipenda) Provinsi DKI Jakarta)

1. Alasan yang melatarbelakangi Dipenda untuk menerapkan sistem pengawasan *online* terhadap proses administrasi Pajak Restoran.
2. Peran Dipenda dalam mengawasi jalannya sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran *online*.
3. Mekanisme sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran.
4. Proses pelaksanaan sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran *online*.
5. Deteksi melalui sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran *online* terhadap upaya penghindaran pajak.
6. Perubahan jumlah Wajib Pajak Restoran dengan diterapkannya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.
7. Jumlah penerimaan pajak setelah adanya sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.

PEDOMAN WAWANCARA

(Pihak Wajib Pajak Restoran yang proses administrasi Pajak Restorannya diawasi dengan sistem *online* oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta)

1. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya pengawasan melalui sistem *online*.
2. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta setelah adanya pengawasan melalui sistem *online*.
3. Anda merasa dimudahkan atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh dipenda Provinsi DKI Jakarta.
4. Tanggapan anda dengan adanya penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta.
5. Penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan harapan Anda.

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Edi Sumantri
Jabatan : Kepala Seksi Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah
Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta
Tanggal : 10 Oktober 2008
Pukul : 15.50 – 16.20
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta
(Jl. Abdul Muis No.66 Jakarta Pusat)

1. Bagaimana proses pengawasan Pajak Restoran sebelum diadakannya sistem *online* ini?
“Proses pengawasan sebelumnya merupakan sistem yang sangat bergantung kepada kualitas, kuantitas dan keaktifan petugas pajak dalam hal ini Dipenda ya. Biasanya pengawasan yang dilakukan melalui legalisasi bon *bill*, pemeriksaan, *silent operation* ataupun verifikasi. Semua pengawasan tersebut lebih bergantung pada petugas pajak. Wajib Pajak menjadi kurang aktif.”
2. Apakah dengan diterapkannya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* mampu memberikan kemudahan bagi fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan?
“Pada dasarnya kedua belah pihak, baik fiskus maupun Wajib Pajak Restoran dimudahkan dengan adanya sistem *online* ini. Hmm, ya kalau dari fiskus dalam hal ini Dipenda mereka jadi lebih mudah dalam mengawasi. Sistem ini mampu meminimalisasi kontak antara Wajib Pajak Restoran dengan petugas pajak Dipenda. Sedangkan kalau dari sisi Wajib Pajak mereka tidak perlu lagi repot-repot menyetorkan bon *bill* ketika membayar SPTPD kan sudah terintegrasi melalui sistem *online* ini.”
3. Bagaimana mekanisme Dipenda dalam proses pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*?
“Mekanisme pengawasan Dipenda ya melalui alat yang dipasang di setiap mesin kasir yang terhubung dengan komputer Dipenda. Komputer kita bisa

membaca perubahan jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar setiap kali terjadi transaksi.”

4. Sejauh mana pelaksanaan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* mampu mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak Restoran?

“Dari restoran yang sudah dipasangkan sistem *online* ini, mereka dinilai baik oleh Dipenda. Dengan sistem *online* ini mereka kan tidak dapat lagi mengelak dari jumlah pajak yang harus dibayar. Mereka menjadi lebih patuh karena adanya data yang lebih transparan yang menjadi dasar penetapan SPTPD. Wajib Pajak tidak lagi bisa memanipulasi data transaksi mereka”

5. Bagaimana mekanisme pengawasan melalui sistem *online* ini mampu mencegah terhadap penyimpangan peraturan perundang-undangan?

“Ya terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tadi kita bicarakan, maka dengan Wajib Pajak menjadi patuh, penyimpangan peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir.”

6. Apakah dengan adanya pengawasan melalui sistem *online* terhadap proses administrasi Wajib Pajak Restoran mampu mencegah terjadinya penghindaran pembayaran Pajak Restoran?

“Oh ya. Dengan digunakannya sistem *online* ini, maka transaksi yang terjadi langsung ter-*record* di komputer Dipenda. Wajib Pajak tidak bisa lagi berkelit seputar jumlah pajak yang harus dibayar. Sehingga penghindaran pembayaran pajaknya bisa diminimalisir.”

7. Sejauh mana pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* mampu berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak?

“Tunggakan pajak memang dapat lebih mudah terlacak. Tetapi kalo soal pengaruhnya terhadap jumlah tunggakan pajak belum bisa disimpulkan karena yang sudah diterapkan pengawasana sistem *online* ini adalah Wajib Pajak Restoran yang bisa dikatakan patuh dan kooperatif.”

8. Bagaimana peran Dipenda selaku pengawas proses administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* dalam peningkatan penerimaan pajak?

“Dipenda berperan aktif dalam melakukan pengawasan, karena setiap transaksi yang terjadi langsung dapat ter-*record* langsung di komputer Dipenda.”

9. Apakah pengawasan proses administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* dapat mempertegas pemberian sanksi atau hukuman?

“Lebih tepatnya bukan mempertegas, pengawasan melalui sistem *online* ini justru membantu Wajib Pajak Restoran untuk terhindar dari sanksi denda 2% akibat bon atau bill tidak diporporasi.”



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Dedyanto
Jabatan : Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta
Tanggal : 13 Oktober 2008
Pukul : 15.35 – 16.15
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta (Jl. Abdul Muis No.66 Jakarta Pusat)

1. Apa alasan yang melatarbelakangi bagi Dipenda untuk menerapkan sistem pengawasan *online* terhadap proses administrasi Pajak Restoran?
“Maksud dan tujuannya pada dasarnya untuk melaksanakan monitoring pengawasan data omzet Wajib Pajak Restoran melalui sistem *online* agar data transaksi omzet Wajib Pajak Restoran yang bersangkutan dapat terhimpun dengan baik. Kalau terhimpun dengan baik akan lebih mudah dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Restoran yang harus disampaikan ke Dipenda.”
2. Bagaimana peran Dipenda dalam mengawasi jalannya sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran *online* ini?
“Peran Dipenda sebagai pengawas. Sistem *online* yang ada akan menghubungkan antara terminal transaksi omzet Wajib Pajak Restoran dengan sistem monitoring omzet Wajib Pajak Restoran yang dikelola oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta.”
3. Sejauh mana mekanisme sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran ini berjalan di lapangan?
“Adanya konsep tenis pada pengawasan melalui sistem *online* ini yaitu melalui Ambil-Kirim-Simpan (AKS) yang tidak akan mengganggu sistem Wajib Pajak Restoran yang bersangkutan. Wajib Pajak nggak perlu khawatir, tidak semua data yang ada pada Wajib Pajak Restoran akan diambil, Dipenda hanya akan mengambil data yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Pajak Restoran saja.”

4. Bagaimana proses dalam pelaksanaan sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran *online* ini?

“Hmm ada lima metode yang pakai biasanya, pertama *silent operation*, ada orang kami yang diam-diam makan dan melihat bagaimana proses *recording* transaksi yang dilakukan. Kedua, ada *network management*, bisa dimonitor secara langsung saat itu juga jumlah transaksi di satu restoran dan berapa jumlah Pajak Restoran yang harus dibayarnya. Ketiga, perawatan. Keempat, diperlukan adanya proses klarifikasi dengan SP2D terkait dengan jumlah Pajak Restoran yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran dengan yang seharusnya dibayar. Yang terakhir ya harus ada koordinasi data antar unit yang terkait dengan pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* itu.”

5. Bagaimana sistem *online* ini dapat mendeteksi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran?

“Ya deteksinya bisa dilihat ketika data dari Wajib Pajak Restoran di *cross* dengan data yang ada di SP2D. Akan terlihat apabila ada perbedaan angka pajak yang dibayar dengan yang seharusnya dibayar.”

6. Apakah ada perubahan jumlah Wajib Pajak Restoran dengan diterapkannya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini?

“Sampai saat ini belum ada karena memang pengawasan melalui sistem *online* ini baru diberlakukan. Hanya beberapa restoran yang sudah diterapkan. Ya masih *pilot project*-lah. Tergolong berjalan baik sih.”

7. Bagaimana jumlah penerimaan pajak setelah adanya sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini?

“Jumlah penerimaan pajak ya memang belum ada perubahan secara signifikan. Karena masih *pilot project* tadi. Apabila sudah diterapkana secara menyeluruh mungkin bisa dilihat perbedaannya, ya sekitar tahun depanlah.”

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Rizka
Jabatan : *Manager On Duty Izzi Pizza Tebet*
Tanggal : 27 November 2008
Pukul : 16.15 – 16.25
Tempat : Izzi Pizza Tebet
(Jl. MT. Haryono Jakarta Selatan)

1. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya pengawasan melalui sistem *online* ini?
“Sebelum adanya sistem *online* ini, kami harus melakukan legalisasi bon atau bill yang kami keluarkan per konsumen dalam setiap transaksi. Agak repot sih karena memakan waktu, tenaga dan biaya operasional kami”
2. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta setelah adanya pengawasan melalui sistem *online* ini?
“Kalau setelah adanya pengawasan Pajak Restoran yang harus kami sampaikan ke Dipenda, kami tidak perlu lagi melakukan legalisasi bon atau *bill* tersebut. Lebih ringan juga dalam hal *cost* dan waktu.”
3. Apakah anda merasa dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh dipenda Provinsi DKI Jakarta tersebut?
“Pasti. Kami merasa dimudahkan karena dalam hal penyampaian Pajak Restoran kami, kami merasa sudah menyampaikan data yang benar sehingga *image* restoran kami pun menjadi lebih baik. Kami berusaha sebaik mungkin untuk berkontribusi kepada masyarakat.”
4. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta?
“Tanggapan kami selaku pihak Izzi Pizza Restoran, kami merasa terbantu dengan adanya pengawasan melalui sistem *online* ini. Tidak perlu repot dan bisa menghindari sanksi denda akibat bon atau bill tidak diporporasi.”

5. Apakah penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan harapan Anda?

“Yang namanya sistem itu kan selalu berjalan dan disempurnakan. Untuk sistem *online* yang ada saat ini kami sih merasa sistem ini sudah cukup membantu kami. Kalau harapan kami ya semoga sistem semacam ini dapat diterapkan di seluruh usaha restoran, tidak hanya di Jakarta akan tetapi di Indonesia.”



TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Supatmin
Jabatan : *Store Manager* Mc Donald's Mall Taman Anggrek
Tanggal : 27 November 2008
Pukul : 12.56 – 13.10
Tempat : Mall Taman Anggrek
(Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat)

1. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya pengawasan melalui sistem *online* ini?
“Sistem pengawasan yang kami diharuskan untuk memporporasi bon *bill* itu loh. Hmm pihak kami harus melampirkan tembusan bon *bill* saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.”
2. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta setelah adanya pengawasan melalui sistem *online* ini?
“Sekarang sih sudah *online*. Lebih efisien, hemat waktu, tenaga dan energi.”
3. Apakah anda merasa dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta tersebut?
“Jelas lebih mudah, kami tidak perlu repot-repot kirim tembusan bon *bill* kok pas bayar.”
4. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta?
“Bagus, memudahkan kami sebagai Wajib Pajak Restoran. Anda tahu sendiri kesibukan kami seperti apa. Sistem ini membuat lebih mudah.”
5. Apakah penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan harapan Anda?
“Sesuai, malah kalau bisa diperbanyak yang menggunakan sistem *online* ini biar terasa lebih ada aja. Semua restoran harus diawasin pake sistem *online*.”

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : **Hindra**
Jabatan : **Store Manager Pizza Hut Permata Hijau**
Tanggal : **27 November 2008**
Pukul : **18.45 – 18.55**
Tempat : **ITC Permata Hijau**
(Jl. Letjen Soepono Jakarta Selatan)

1. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta sebelum adanya pengawasan melalui sistem *online* ini?
“Sistem yang agak rumit sebenarnya, nyampein bon *bill* buat diporporasi, walaupun hanya tembusannya saja.”
2. Bagaimanakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta setelah adanya pengawasan melalui sistem *online* ini?
“Sistem yang sekarang lebih bagus, memudahkan pihak kami. Tidak sulit untuk dijalankan.”
3. Apakah anda merasa dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta tersebut?
“Ya, karena irit. Kami tidak perlu mengadakan bon *bill*, kan sudah terintegrasi dengan Dipenda. Jadi uang untuk pengadaan bon *bill* bisa dialokasikan untuk yang lain. Pencatatan transaksi langsung tersambung ke server Dipenda.”
4. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta?
“Tanggapan kami selaku pihak Pizza Hut, sistem yang sedang berjalan ini merupakan sistem yang cukup baik. Membuat kerja kami lebih efektif dan efisien. Hemat waktu dan tidak ada *dispute* dengan mengenai jumlah pajak yang harus kami bayar.”
5. Apakah penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan harapan Anda?

“Sudah cukup bagus, kalau bisa disempurnakan lagi, misalnya diberlakukan untuk semua restoran di Jakarta. Lebih praktis dan mudah.”

